

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
							Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,497,483,240	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							16,421,300	
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersusunnya RKA SKPD	21 Dokumen 21 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,611,900
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	21 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,910,900
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71 Laporan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	100 %		6,898,500
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,104,008,895	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		2,021,928,895
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen 1 Tahun	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,080,000
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,362,000	
8	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Dokumen 14 Laporan	Tersedianya Administrasi barang milik daerah	100 %		1,362,000
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							96,978,600	
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Persentase ASN Bakesbangpol berkinerja sesuai target perjanjian kinerja	100 %		57,000,000
8	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	Persentase ASN Bakesbangpol berkinerja sesuai target perjanjian kinerja	100 %		39,978,600
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							411,802,550	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	55 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi umum perangkat Daerah	100 %		7,367,000
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi umum perangkat Daerah	100 %		53,787,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi umum perangkat Daerah	100 %		157,748,550
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi umum perangkat Daerah	100 %		20,050,000
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrtasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1050 buku	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi umum perangkat Daerah	100 %		3,960,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi umum perangkat Daerah	100 %		168,890,000	
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								474,461,100	
8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		252,000,000	
8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		64,438,000	
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,925,100	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		113,098,000	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50,502,795	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	100 %		41,433,495	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 tahun	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	100 %		9,069,300	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								341,946,000	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 tahun 11 Unit	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	100 %		209,400,000	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun 11 Unit	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	100 %		131,326,000	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	100 %		1,220,000	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								411,721,000	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								411,721,000	
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan IPOLEKSOSBUD, Bhineka tunggal Ika, Bela Negara dan sejarah kebangsaan	82 %	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	15 Dokumen	Persentase Peningkatan IPOLEKSOSBUD, Bhineka Tunggal Ika, Bela Negara dan Sejarah Kebangsaan	82 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	254,341,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan IPOLEKSOSBUD, Bhineka tunggal ika, Bela Negara dan sejarah kebangsaan	82 %	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 Dokumen	Persentase Peningkatan IPOLEKSOSBUD, Bhineka Tunggal Ika, Bela Negara dan Sejarah Kebangsaan	82 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157,379,500	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								3,953,729,925	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								3,953,729,925	
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan pendidikan Politik, etika Budaya Politik dan Demokrasi	92 %	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Demokrasi	92 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,500,513,125	
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan pendidikan Politik, etika Budaya Politik dan Demokrasi	92 %	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Demokrasi	92 %		400,550,000	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan pendidikan Politik, etika Budaya Politik dan Demokrasi	92 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Demokrasi	92 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,666,800	
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan pendidikan Politik, etika Budaya Politik dan Demokrasi	92 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Demokrasi	92 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,000,000	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								221,877,400	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								221,877,400	
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran, Pemberdayaan, Evaluasi, Mediasi Ormas Lokal dan Asing	85 %	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Persentase peningkatan Pelayanan Pendaftaran, Pemberdayaan, Evaluasi, Mediasi Ormas Lokal dan asing	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,452,900	
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran, Pemberdayaan, Evaluasi, Mediasi Ormas Lokal dan Asing	85 %	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Persentase peningkatan Pelayanan Pendaftaran, Pemberdayaan, Evaluasi, Mediasi Ormas Lokal dan asing	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,924,500	
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran, Pemberdayaan, Evaluasi, Mediasi Ormas Lokal dan Asing	85 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	Persentase peningkatan Pelayanan Pendaftaran, Pemberdayaan, Evaluasi, Mediasi Ormas Lokal dan asing	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran, Pemberdayaan, Evaluasi, Mediasi Ormas Lokal dan Asing	85 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	Persentase peningkatan Pelayanan Pendaftaran, Pemberdayaan, Evaluasi, Mediasi Ormas Lokal dan asing	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								510,154,500	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								510,154,500	
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase peningkatan Fasilitas P4GN dan Agama	87 %	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	Persentase Peningkatan Fasilitas P4GN dan Agama	87 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	214,204,500	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase peningkatan Fasilitas P4GN dan Agama	87 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	Persentase Peningkatan Fasilitas P4GN dan Agama	87 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	212,800,000	
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase peningkatan Fasilitas P4GN dan Agama	87 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	Persentase Peningkatan Fasilitas P4GN dan Agama	87 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,150,000	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								2,181,262,400	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								2,181,262,400	
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase daerah yang dilakukan pengawasan terkait konflik dan sara dengan baik	95 %	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	Persentase Informen yang ditingkatkan Kompetensinya	95 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	866,348,500	
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase daerah yang dilakukan pengawasan terkait konflik dan sara dengan baik	95 %	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	Persentase Informen yang ditingkatkan Kompetensinya	95 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123,422,600	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase daerah yang dilakukan pengawasan terkait konflik dan sara dengan baik	95 %	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	Persentase Informen yang ditingkatkan Kompetensinya	95 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,904,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase daerah yang dilakukan pengawasan terkait konflik dan sara dengan baik	95 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang	Persentase Informen yang ditingkatkan Kompetensinya	95 %	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,360,000	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase daerah yang dilakukan pengawasan terkait konflik dan sara dengan baik	95 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	Persentase Informen yang ditingkatkan Kompetensinya	95 %		137,390,000	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daerah yang dilakukan pengawasan terkait konflik dan sara dengan baik	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Persentase Informen yang ditingkatkan Kompetensinya	95 %		819,836,800	
TOTAL													10,776,228,465	